



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI  
**SUB UNIT KERJA** : KEPALA LEMBAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AGUNG SUPRIO
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 651948

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m<sup>2</sup>/15 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 300.000.000

1. MOBIL, INNOVA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.082.641.605

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.882.641.605

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.882.641.605

---

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **21 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 April 2020/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
**SUB UNIT KERJA** : KOMISIONER

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **IRSAL AMBIA**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **779283**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **650.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **70.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS COROLLA ALTIS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **----**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **91.000.000**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **----**

**Sub Total** Rp. **811.000.000**

**III. HUTANG** Rp. **----**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **811.000.000**

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Desember 2020**.



4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 April 2020/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
**SUB UNIT KERJA** : KOMISIONER

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MOHAMAD REZA**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **718101**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/154 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 130.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU SIGRA MINIBUS/MOBIL PENUMPANG Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 68.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 12.598.434

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 511.098.434

**III. HUTANG** Rp. 294.711.692

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 216.386.742

---

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 September 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
**SUB UNIT KERJA** : KOMISIONER

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YULIANDRE DARWIS
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 452771

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 9.880.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , WARISAN Rp. 2.500.000.000
2. Tanah Seluas 9.985 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
3. Tanah Seluas 42 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HADIAH Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , WARISAN Rp. 180.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 4.800.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 820.000.000**

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO MOTOR BEBEK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT MOTOR BEBEK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
5. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	513.604.970
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.213.604.970
III. HUTANG	Rp.	4.400.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.813.604.970

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **6 Oktober 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL  
**SUB UNIT KERJA** : SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **UMRI**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **99021**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m<sup>2</sup>/55 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m<sup>2</sup>/21 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 129.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HADIAH Rp. 7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 21.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 27.200.812**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.127.200.812**III. HUTANG** Rp. 90.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.037.200.812

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkn.kpk.go.id](http://elhkn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.